

RANCANG BANGUN DAN NILAI DASAR UNIVERSAL EKONOMI ISLAM

Sulistiyowati*

ABSTRACT

The main concern of Islamic economics is on how human effort to improve the welfare of material which will simultaneously increase their spiritual welfare. Because the spiritual must be present along with the target material, it needs the main support means, namely morality ekonomi. Fondasi Islamic economic actors consists of five universal values, among others, monotheism, in the design of the economic base of Islam, meaning the monotheistic god so true owner of the entire existing in the universe and the gods did not create anything in vain, and man was created to worship. Adil is defined as oppressing and oppressed, the fair is put things in place. The implication of this value is that economic agents are not allowed to pursue personal gain when it harms others or damaging nature. Nubuwwah the main qualities that should be followed generally by humans, in particular by economic actors and businesses as exemplified by the Prophet Muhammad by nature siddiq, trust, fathanah and sermons in running the business enterprise, the next caliphate In Islam, the government plays the role of small, but very important in the economy. Its main role is to ensure the economy to run in accordance with sharia, and to ensure that no violation of the rights of man, the latter is Ma'ad (result) The implications of this value in the economic life and business. motivate businesses to make a profit. Profit world and the hereafter profit thus the concept of profit gain legitimacy in Islam. Fifth universal value of the economic foundations of Islam or Islamic economic foundation, the basis for the inspiration to formulate theories and propositions of Islamic economics.

Keywords: Design, Universal Basic Values and Islamic Economics.

A. PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi saat ini sudah tidak asing lagi di telinga, ilmu ekonomi merupakan kelompok ilmu sosial karena yang menjadi sasaran studinya perilaku masyarakat. Menurut Kuswanto (1996:3) ilmu ekonomi berbeda dengan ilmu sosial lainnya, ilmu ekonomi mempelajari masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan dengan memilih sumber-sumber produksi yang terbatas dan cara pemakaiannya yang paling tepat. Beberapa orang ada yang menyatakan bahwa ekonomi itu sulit, tetapi memegang peranan penting sekali karena berhubungan dengan benda dan uang yang sangat saya cintai dan berkuasa atas hati manusia. Ekonomi itulah sumber dari segala pekerjaan dan dengan ekonomi pula manusia mencapai tingkat yang paling tinggi dari kemajuan dan kebahagiaan (Zaky Al Kaaf, 2002:14).

Ekonomi Islam menurut Muhammad (2004:3) merupakan disiplin ilmu yang sedang berkembang. Ekonomi Islam saat ini belum banyak mendapat perhatian dari para ekonom. Ekonomi islam menyajikan pandangan Islam dalam konteks aktivitas ekonomi manusia dan merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang.

Dalam ilmu ekonomi konvensional, diketahui bahwa objek dan ruang lingkup ilmu ekonomi adalah perilaku ekonomi manusia atau masyarakat secara umum, begitu juga dengan ruang lingkup ekonomi Islam. Sebagian besar ekonom muslim berpendapat bahwa ruang lingkup ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada masyarakat atau negara muslim saja, tetapi mencakup seluruh umat manusia. Dengan kata lain, Syakur (2011:27) berpendapat bahwa titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagaimana Islam memberikan pandangan dan

*Dosen Jurusan Syariah STAIN Kediri.

solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum.

Ilmu ekonomi islam tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus diajukan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah islam. Jadi, definisi ekonomi islam diatas mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal (Veithzal & Andi Buchari, 2009:29). Akan tetapi, dengan menggunakan tuntunan islam atau syariah keuntungan yang didapat dalam perniagaan memiliki dua sisi, yaitu keuntungan yang berkaitan dengan masalah duniawi dan keuntungan yang berkaitan dengan masalah ukhrawi. Dengan begitu, keuntungan yang didapat dalam ekonomi islam tidak hanya bersifat material saja, tetapi juga bersifat non-material (Yafie, 2003:14).

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut Muhammad Al-'asal (2009:135) ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang memandang masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya, dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.

Dari pemahaman ekonomi Islam ini, menunjukkan bahwa sistem ekonomi ini bukan hanya ditujukan bagi umat Islam saja. Sebab, bagi Mustaq (2001:78) semua umat manusia bisa dan berhak untuk menggunakan konsep yang ada dalam sistem ekonomi berbasis ajaran Islam tersebut.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya:

Sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105:“ Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu”. Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabada Rasulullah Muhammad saw: “Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan.”(HR.Thabrani dan Baihaqi).

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi islam menurut (1995:218) adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri (*maqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*) inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi dalam pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan Negara, akan tetapi juga memerhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi islam, sebab keimanan merupakan fondasi bagi seluruh prilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang islam secara (*kaffah*), maka niscaya semua muamalah akan baik pula. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, pengambilan keputusan, dan prilaku masyarakat. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan keimanan yang benar, yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah pada perwujudan *mashlahah* untuk mencapai *falah*.

Dengan demikian, sebagai suatu cabang ilmu, ekonomi islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka

kepada kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*). Dengan demikian, perhatian utama ekonomi islam adalah pada upaya bagaimana manusia meningkatkan kesejahteraan materialnya yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan spiritualnya. Karena spiritual harus hadir bersamaan dengan target material, maka di perlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi (Syakur, 2011:210).

3. Kepemilikan dalam islam

Dalam pandangan Islam, pemilik mutlak dari seluruh alam semesta adalah Allah, sementara manusia hanya mengemban amanah-Nya. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk diri-Nya (*wasilah al-hayah*) bagi manusia agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, adanya hak milik membawa konsekuensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Pada akhirnya, hak milik ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah di akherat kelak. Sebagaimana yang diungkap oleh Muhammad (2005:165) bahwa Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Hak milik individual (*mikiyah fardhiah/ private ownership*), Hak milik umum atau publik (*milkiyah 'ammah/ public ownership*), Hak milik negara (*milkiyah daulah/ state ownership*).

Pada dasarnya kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan individu merupakan persyaratan yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebab akan menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi seorang individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seorang individu diberikan kebebasan tinggi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber daya bagi kepentingan sepanjang dengan:

- a) Cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariah Islam;
- b) Tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kepemilikan umum muncul karena suatu benda pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat umum sehingga menjadi kepentingan bersama. Ajaran Islam tidak membatasi kepada jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga kemungkinan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Akan tetapi, hak milik umum terdapat dalam benda-benda dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Merupakan fasilitas umum, di mana kalau benda ini tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya, seperti jalan raya, air minum, dan sebagainya
- b) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual.
- c) Bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya
- d) Harta benda *waqf*, yaitu harta seseorang yang dihibahkan untuk kepentingan umum.

Hak milik negara pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau individu, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat sekaligus mengemban misi kekhalifahan Allah di muka bumi. Berbeda dengan hak milik umum, hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan Negara menghendaki demikian. Akan tetapi, menurut Karim (2010:123) hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah.

4. Perbandingan Konsep Kepemilikan Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam

Konsepsi tentang hak milik memiliki implikasi yang mendasar bagi keseluruhan system ekonomi. Konsep ini akan menjadi

Indikator	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sifat kepemilikan	Kepemilikan mutlak oleh manusia	Kepemilikan mutlak oleh manusia	Allah adalah pemilik mutlak, sementara manusia memiliki hak kepemilikan terbatas
Hak pemanfaatan	Manusia memanfaatkannya	Manusia bebas memanfaatkannya	Pemanfaatan oleh manusia mengikuti ketentuan Allah
Prioritas kepemilikan	Hak milik individu dijunjung tinggi	Hak milik kolektif atau sosial dijunjung tinggi	Hak milik individu dan kolektif diatur oleh agama
Peran individu dan Negara	Individu bebas memanfaatkan sumber daya	Negara yang mengatur pemanfaatan sumber daya	Terdapat kewajiban individu-masyarakat-negara secara proposional
Distribusi kepemilikan	Bertumpu pada mekanisme pasar	Bertumpu pada peran pemerintah	Sebagian diatur oleh pasar, pemerintah, dan langsung oleh Al-Qur'an
Tanggung jawab pemanfaatan	Pertanggung jawaban kepada diri sendiri secara ekonomis-teknis belaka	Pertanggung jawaban kepada publik secara ekonomis-teknis belaka	Pertanggung jawaban kepada diri, publik dan Allah di dunia dan akhirat

dasar tentang apa (*what*), bagaimana (*how*), dan mengapa (*why*) mengelola, serta untuk siapa (*for whom*) seluruh sumber daya ekonomidi muka bumi ini. Bertolak dari konsep hak milik ini, maka sistem ekonomi Islam adalah perekonomian dengan tiga sektor, yaitu sektor pasar, masyarakat dan negara. Masing-masing memiliki sektor memiliki hak dan kewajiban tertentu, sesuai dengan ajaran Islam, dalam menggerakkan kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umat (*falah*) (Karim, 2010:6).

a. Pelaku Ekonomi dalam Islam

1) Pasar dalam Ekonomi Islam

Adanya hak milik individu dan kebebasan individu untuk bertransaksi merupakan faktor dasar bagi eksistensi pasar. Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Pertukaran dapat berupa jual-beli, sewa, atau utang-piutang.

Pelaku pasar pada dasarnya terdiri atas rumah tangga dan perusahaan, sementara pasar dapat diklasifikasikan menjadi pasar input dan pasar output. Rumah tangga dapat terdiri atas perseorangan atau kelompok (misalnya keluarga), sedangkan perusahaan dapat berupa perseorangan atau lembaga usaha. Di pasar input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi yang dibutuhkan oleh

perusahaan, sedangkan di pasar output rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Di pasar input, rumah tangga menyediakan berbagai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor-faktor produksi ini akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Rumah tangga akan memperoleh imbalan berupa pendapatan sewa, upah, bagi hasil, dan laba yang kemudian akan dipergunakannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.

Ajaran Islam menghargai pasar sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang *halal* (sah/legal) dan *thayyib* (baik) sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar menurut Karim Rusli (1992:231) berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan prinsip saling ridha (*'an taradin minkum*) sehingga tercipta keadilan. Pasar merupakan mekanisme perniagaan yang memenuhi kriteria tersebut.

2) Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah pemerintah dalam

sistem ekonomi Islam bukan semata karena kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan pasar. Pada dasarnya, peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifahan dan konskuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) untuk merealisasikan *falah*.

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rasul-Nya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan (*al-adl wah ihsan*) bagi seluruh umat. Secara umum peranan pemerintah ini akan berkaitan dengan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami dan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Suatu pasar yang Islami akan sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pemerintah. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Pertama, peran yang berkaitan dengan dengan implementasi nilai dan moral Islam.
- b) Kedua, peran yang berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme pasar (*market imperfection*).
- c) Ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar (*market failures*).

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas, dan berbagai masalah ekonomi lain yang memang tidak bisa terselesaikan melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, menurut Karim (2010:8) pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

3) Peran Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Kewajiban merealisasikan *falah* pada dasarnya merupakan tugas seluruh *economic agents*, termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah sehingga masyarakat harus berperan langsung. Terdapat

fenomena *market failure* dan *government failure* (Ahmad Fadhil, 2001:25).

Pasar pada hakikatnya adalah wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga, yang tentu saja lebih didorong oleh motif-motif mencari keuntungan individual.

Pemerintahan dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan *falah*. Peranan masyarakat juga muncul karena adanya konsep hak milik public dalam ekonomi islam, seperti *waqf*. Kekayaan *Waqf* adalah kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan berlaku sepanjang masa karenanya *waqf* merupakan hak milik masyarakat yang tidak tergantung kepada pemerintah yang berkuasa.

Pemerintah dapat berganti dari waktu ke waktu, sementara masyarakat terikat dalam kewajiban sosial jangka panjang. Karenanya, berbagai kekayaan *waqf* akan tetap di kelola oleh masyarakat sendiri. Dalam pandangan islam, masyarakat bisa di artikan secara sempit ataupun luas dan hierarki ini terkait tanggung jawab dan hak masing-masing. Dalam lingkup yang paling kecil setelah individu adalah masyarakat keluarga.

b. Perbedaan sudut pandang

Islam tidak melarang adanya perbedaan pandangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan masalah selain akidah. Sebab perbedaan pandangan dalam islam merupakan suatu rahmat. Demikian pula, perbedaan pandangan dalam hal pengertian dan dimensi ekonomi islam bisa jadi berbeda dikalangan ahli ekonomi islam. Karena menurut Karim (2010:221) masing-masing memiliki pandangan dan dasar hukum atau rasionalitas dalam memandang ekonomi islam sebagai suatu disiplin ilmu.

Dalam tatanan paradigma, ekonom-ekonom Muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Akan tetapi, ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi islam, mulai muncul perbedaan pendapat. Pemikir ekonom-ekonom muslim kontemporer dapat

diklasifikasikan menjadi tiga mazhab. Menurut Muhammad (2005:155) perbedaan filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandangan keduanya dalam melihat pandangan ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia sifatnya terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak menegenal sumberdaya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah al Qur'an. "sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat tepatnya" (QS Al-Qamar [54] 49). Mazhab Baqir As-Sadr, Mazhab *mainstream*, Mazhab Alternatif krisis:

1) Mazhab Baqir As – Sadr

Mazhab ini di pelopori oleh Baqir As – Sadr dengan buku yang fenomenal *iqtishaduna*⁸(ekonomi kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economic*) tidak pernah sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap dengan ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak dapat di satukan karena keduanya berasal dari *filosofis yang kontradiktif*, yang satu anti-Islam dan yang lainnya Islam.⁹

Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai dari system yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap sifat yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses sumberdaya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu sumber daya ini bukan karena sumberdaya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Tokoh Mazhab ini selain Baqir As-Sadr adalah Abbas Mirakor, Baqir Al Hasani, Kadim As Sadr Iraj Toutounchian, Hedayati Dan lain-lain.

2) *Mazhab Mainstream*

Mazhab Mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Baqir. Mazhab yang kedua ini setuju bahwa masalah ekonomi

muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas, keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan di akui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah "dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar" (QS Al Baqarah [2] :155). Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. Bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah, bila diberikan dua lembah ia akan meminta tiga lembah dan begitupun seterusnya sampai ia masuk kubur. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Dalam bahasa al Qur'annya pilihan dilakukan dengan "mempertuhankan hawa nafsunya" tetapi dalam ekonomi Islami, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya termasuk ekonomi selalu dipandu oleh Allah lewat al Qur'an dan sunnah.

3) Mazhab Alternatif Klasik

Pelopor mazhab ini adalah Timur Kuran (*ketua jurusan ekonomi di university of southern California*), Jomo (*yale, cambridge, Harvard, Malaya*), Muhammad Arif, dll. Mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya, mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan sebelumnya. Mazhab *mainstream* dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neo-klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Mazhab ini berpendapat bahwa ekonom Islam adalah tafsiran manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga nilai

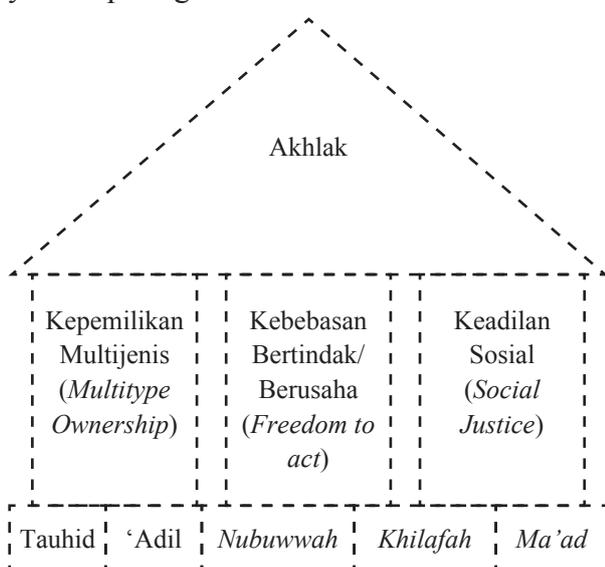
kebenarannya tidak mutlak. Proporsi dan teori yang diajukan oleh ekonomi islam harus selalu diuji kebenarannya. Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis, mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus di lakukan kepada sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga kepada ekonomi islam tu sendiri.

Mereka yakin bahwa islam pasti benar, tetapi ekonomi islam belum tentu benar karena ekonomi islam adalah hasil tafsiran manusia atas al qur'an dan sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang di ajukan dalam ekonomi islami harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang telah dilakukan terhadap ekonomi konvensional.

C. PEMBAHASAN

1. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Gambaran rancang bangun ekonomi islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan rumah yaitu seperti gambar dibawah ini:



2. Fondasi Ekonomi Islam

Fondasi ekonomi islam terdiri dari lima nilai universal yaitu :

a. Tauhid

Tauhid adalah salah satu pondasi dalam ajaran islam, dengan tauhid manusia dapat menyatakan bahwa tiada sesuatu pun yang layak

disembah kecuali allah dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya, selain Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Menurut Syakur (2011:121) didalam rancang bangun dasar ekonomi islam, makna tauhid yaitu allah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta dan allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan untuk beribadah.

Tauhid merupakan inti pokok ajaran islam yang berupa pengakuan bahwa tiada tuhan selain Allah, satu-satunya Dzat yang berhak disembah. Dan manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya dan segala aktivitas manusia dalam hubungan baik dengan alam maupun dengan manusia, di bingkai dalam suatu wadah berbentuk kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia mempertanggung jawabkan segalanya, begitu juga dengan aktivitas ekonomi dan bisnis (Syakur, 2011:23).

Dengan tauhid yang benar, pelaku ekonomi menjadikan landasan ketauhidan dalam setiap aktivitasnya. Dengan tauhid yang benar pula, pelaku ekonomi melakukan aktivitas ekonomi dengan senantiasa mengingat bahwa pertanggungjawaban yang hakiki adalah pertanggungjawaban akhirat. Dengan pondasi yang kokoh ini, diharapkan agar setiap pelaku ekonomi dapat memahami dan melaksanakan islam secara benar, lalu meyakini bahwa ekonomi islam tidak terlepas dari islam itu sendiri.

b. 'Adl (keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim. Menurut Mannan (1995:99) manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah dibumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Menurut Mujahidin (2007:117) dalam islam adil didefinisikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi."

Jadi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi *eksploitasi* manusia atas manusia (Rusli, 1992:88). Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Berdasarkan makna adil yang terdapat dalam alquran ada beberapa nilai yaitu:

a. Persamaan hukum

Adalah semua orang diberlakukan dengan hak yang sama dimata hukum, tidak boleh terdapat deskriminasi terhadap seseorang dimata hukum atas dasar apapun, juga dalam konteks ekonomi semua orang diberlakukan dengan cara yang sama (Bertens, 1997:104).

b. Proporsional

Adalah adil tidak selalu disamakan sebagai hak umum. hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau baik dari sisi tingkat kebutuhan, pengorbanan, tanggung jawab ataupun kontribusi yang diberikan dari seseorang (Muhammad Al-‘asal, 1999:118).

c. *Nubuwwah* (kenabian)

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar didunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubah*) ke asal-muasal segala, yaitu Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirinkan “*manusia model*” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Menurut

Mustaq (2001:77) sifat-sifat utama yang harus diteladani pada umumnya oleh manusia, pada khususnya oleh pelaku ekonomi dan bisnis. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut:

a. *Sidiq* (benar, jujur)

Sifat *siddiq* harus menjadi visi hidup setiap muslim, karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar. Maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya dapat kembali pada pencipta, Yang Maha Benar. Dengan demikian, tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik. Dari konsep *siddiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni *efektivitas* (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan *efisiensi* (melakukan kegiatan dengan benar, yaitu menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).

b. *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)

Amanah menjadi misi hidup setiap muslim, karena Sang Benar hanya dapat kita jumpai dalam keadaan ridha dan diridhai, bila kita menepati amanat yang telah dipikulkan kepada kita (Karim, 2010:103). Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim.

Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antaranggotanya. Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

c. *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita)

Fathanah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Karena untuk mencapai Sang Benar, kita harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling berharga dan termahal yang hanya

diberikan pada manusia adalah akal (*intelektualita*).

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.

d. *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

Tabligh merupakan taktik hidup muslim. Karena setiap muslim mengemban tanggung jawab da'wah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat *tabligh* ini apabila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat *tabligh* menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun masal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini masa, *open management*, iklim keterbukaan dan lain-lain.

Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan nabi dan rasul. Nabi misalnya mengajarkan bahwa "yang terbaik di antaramu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." Dengan kata lain, bila kita ingin "menyenangkan Allah" maka kita harus menyenangkan hati manusi. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional, *prestatif*, penuh perhatian terhadap pemecahan masalah-masalah manusia, dan terus-menerus mengejar hal yang terbaik sampai menuju kesempurnaa. Karena hal yang demikian dianggap sebagai cerminan dari penghambaan (ibadah) manusia terhadap penciptanya.

Bila ekonom muslim akan menyusun teori dan proposisinya, maka hal yang harus

menjadi pegangan adalah bahwa semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar. Bila ada hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh manusia dengan akalnnya maka menjadi tugas manusia untuk terus berusaha menemukan kebenaran tersebut dengan cara apapun (Yunus Al-Misri, 1999:22).

d. ***Khilafah* (pemerintahan)**

Dalam Alquran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya." Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (mu'amalah) antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Alquran: (yaitu) orang-orang yang jika kami kedudukan mereka yang di muka bumi, niscaya mereka menyuruh berbuat baik dan mencegah dari perbuatan jahat.

Dalam hadist lainnya Nabi bersabda: "berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah!" Akhlak Allah diajarkan kepada manusia lewat *al-asma al-usna-Nya* (nama-nama-Nya yang terbaik). Jadi misalnya jika Allah bersifat *al-Waliy*, maka implikasi ekonomi dari berakhlak seperti wali adalah mengelola dan memelihara sumber daya dengan baik supaya bermanfaat bagi manusia generasi kini sampai generasi-generasi selanjutnya. Implikasi ekonomi dari berakhlak seperti *al-razzaaq* adalah menjamin kecukupan hidup (kebutuhan dasar) bagi semua manusia. Implikasi dari *al-fattah*: membuka kesempatan berkarya, menciptakan iklim bisnis yang sehat, membuka akses manusia terhadap ilmu untuk meningkatkan kualitas manusia. Implikasi dari *al-wahhaab*: membangun sistem jaminan sosial yang

tanggung, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Menurut Syed Nawab (2003:35) implikasi sifat *al-malik al-mulk*: menginvestasikan sumber daya secara bijak supaya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi semua. Ini semua merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara atau pemerintah.

Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai *muqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah), yang menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia (Syed Nawab, 2003:18).

e. *Ma'ad* (Hasil)

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan” tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan saja di dunia tetapi harus berlanjut hingga alam setelah dunia (akhirat). Seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat di rumuskan sebagai “Dunia adalah ladang akhirat” Artinya, dunia adalah wahana manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Akan tetapi, sebagaimana pendapat Untung (2012:70) akhirat lebih baik daripada dunia, karena itu Allah melarang kita untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Allah menandakan bahwa manusia diciptakan didunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, perbuatan jahat dibalas dengan hukuman yang setimpal. Karena itu, *ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis

misalnya, diformulasikan oleh Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia dan laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapatkan *legitimasi* dalam islam (Karim, 2010:55)

3. Tiang Ekonomi Islam

Kelima nilai universal dasar-dasar ekonomi islam atau fondasi ekonomi islam, menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi islam. Lima nilai universal ini melahirkan tiga prinsip *derivatif* atau tiang ekonomi islam yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi islam. Prinsip ekonomi islam merupakan kaidah pokok yang membangun struktur ekonomi islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Edwin Nasution (2006:15) implementasi nilai tanpa prinsip atau sebaliknya tidak mengefektifkan tujuan ekonomi islam itu sendiri yaitu *falah*. Berikut adalah prinsip dasar dari ekonomi islam:

Dengan prinsip-prinsip utama di atas maka sistem ekonomi islam dapat dibangun dengansangat kokoh. Ada tiga prinsip sistem pokok dalam ekonomi islam:

Menurut Muhammad (2005:221) ada tiga prinsip tersebut adalah:

a. Kepemilikan Multijenis (*Multitype Ownership*)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *Multitype Ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan negara. Sedangkan dalam islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yang mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.

Prinsip *Multitype Ownership* adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui. Akan tetapi, untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak

ada proses penzaliman segolongan orang terhadap golongan lain. Maka dari itu, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasioanalisis juga diakui. Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam islam, baik campuran swasta negara, swasta domestik asing, atau negara asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma, dan nilai-nilai islam.

b. Kebebasan Bertindak/Berusaha (*Freedom to act*)

Nilai nubuwwah telah menjadi kesimpulan bahwa penerapan nilai Kebebasan Bertindak atau Berusaha akan melahirkan pribadi-pribadi yang *profesional dan prestatif* dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Sifat-sifat nabi yang dijadikan model tersebut adalah terangkum kedalam empat sifat utama, yaitu *siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh*. Sedapat mungkin setiap muslim harus dapat menyerap sifat-sifat ini agar menjadi bagian perilakunya sehari-hari dalam segala aspek keidupan.

Keempat nilai-nilai nubuwwah bila disatukan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah (*good governance*) akan melahirkan prinsip *Freedom to act* pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam islam, dengan syarat tidak ada *distorsi* (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara zalim), *gharar* (*uncertainty*, ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian, *zero-sum game*: orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain) (Andi Buchori, 2003:233).

Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi *market distortin*. Dengan demikian, negara atau pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (*mu'amalah*) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syari'ah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

c. Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Ismail Nawawi (2013:124) berpendapat bahwa nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu mienciptakan sistem perekonomian yang adil. Akan tetapi, tidak semuanya sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Kenyataan yang sering muncul dalam sistem sosialis, negara menjadi faktor yang dominan dan dengan dominasinya tersebut para birokrat dan penguasa menjadi kaum kapitalis di tengah kaum sosialis yang miskin. Tidak berbeda dengan sistem kapitalis, sistem yang mendasarkan pada mekanisme pasar ini bercita-cita keadilan dapat ditegakkan, Akan tetapi, kenyataan mengatakan tidak. Sistem kapitalis justru mendorong terbentuknya industri *korporasi* (perekonomian didominasi oleh sebagian orang kecil itu saja), *melegalkan monopoli* (setidaknya sistem kapitalis tidak mempunyai perangkat kebijakan yang tegas untuk menghilangkan monopoli tersebut) dan sangat menjunjung modal dengan penghargaan yang berlebihan.

Menurut Bustanuddin Agus (2006:48) dalam islam keadilan diartikan dengan suka sama suka (*antarraddiminkum*) dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain (*latazlimuna wa la tuzlamun*). Islam menganut sistem mekanisme pasar, Akan tetapi, tidak semuanya diserahkan pada mekanisme harga. Karena segala distorsi yang muncul dalam perekonomian tidak sepenuhnya dapat diselesaikan, maka islam membolehkan adanya beberapa intervensi, baik intervensi harga maupun pasar. Selain itu, Faisal Badroen (2006:113) berpendapat bahwa islam juga melengkapi perangkat berupa instrumen kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi segala distorsi yang muncul.

D. PENUTUP

Ekonomi Islam saat ini telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi islam yang mantap (fondasi dan tiang ekonomi islam). Akan tetapi, dua hal tersebut belum cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara profesional (*ihsan, itqan*) dalam bidang ekonomi. Baik berada pada posisi produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah. Karena teori yang unggul dan sistem ekonomi yang sesuai syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat islam akan otomatis maju.

Sistem ekonomi islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja dipegang oleh umat non-muslim. Perekonomian umat islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku muslimin dan muslimat itu sendiri sudah itqan (tekun) dan ihsan (profesional). Hal ini mungkin salah satu rahasia sabda Nabi : “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq”. Karena akhlak menjadi indikator atau tolak ukur baik-buruknya manusia. Baik-buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang telah dijalkannya.

Inti kesemuanya, teori atau konsep dasar serta prinsip dasar sistem tidak akan berjalan dengan baik, jika tidak dipayungi oleh Akhlak yang baik. Oleh karena itu Akhlak tentunya menempati posisi puncak atau sebagai atap ekonomi islam, karena Akhlaklah yang menjadi tujuan islam dan dakwah para Nabi, yaitu diutusnya para Nabi dan Rasul hanyalah untuk menyempurnakan Akhlak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adirwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010
- Al-‘asal, Muhammad dkk, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Al-Misri, Rafiq Yunus. *Usul al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: Dar al-Qalami. 1999.
- Arfa, Faisar Ananda. *Islamic Bussiness and Economic Ethics*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2006
- Buchori, Andi. *Islamic Economic*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003
- Bustanuddin, Agus. *Islam dan Ekonomi*. Padang: Andalas University Press. 2006
- Izzan, Ahmad. *Ayat-Ayat Al-Qur’an yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT Remaja Rasdakarya Offset.
- K. Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- M. Rusli, Karim. *Berbagi Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 1992.
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. 1995.

- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. 2005.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Gafindo persada. 2007.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bsnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2001.
- Nawawi, Ismail. *Isu-Isu Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya. 2013.
- Syakur, Ahmad. *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*. Kediri: STAIN Kediri Press. 2011.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggegas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.